

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI

Oleh :

Adinda Chivita Fauziah¹, Tuah Nur², Rizki Hegia Sampurna³

Adindachivita@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRAK

Pemerintah Kota Sukabumi menyadari bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, terlihat dari jumlah penduduk miskin berjumlah 21.870 jiwa atau 6.67 persen penduduk yang masuk kedalam golongan miskin. Ini artinya bahwa tugas pemerintah Kota Sukabumi dalam penanggulangan kemiskinan masih harus di optimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui sejauhmana efektivitas program tersebut dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan anggota populasi sebanyak 1.832 keluarga penerima manfaat dengan teknik penarikan sampel secara random sampling dengan presisi 10% sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Selanjutnya pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier sederhana dan uji t-parsial dengan bantuan perangkat lunak Statistic Package for Social Science (SPSS) versi 21. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat, antara variabel Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas dengan koefisien korelasi kedua variabel $r_{xy} = 0,724$ valid dan dengan koefisien determinasi 52,4 %. Ini artinya adanya pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, Program Keluarga Harapan, Efektivitas, Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap manusia dalam kehidupannya, kesejahteraan ialah kondisi dimana masyarakat yang sejahtera lepas dari jeratan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks, yang sejatinya tidak bisa dilihat hanya dengan sejumlah angka. Kemiskinan sendiri memberikan dampak yang bersifat menyebar (*mutli effects*) terhadap kehidupan yang ada di masyarakat. (Kompasiana.com, 2012). Sebagai negara berkembang di bidang ekonomi, masalah

kemiskinan di Indonesia masih menjadi sorotan utama, kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, baik aspek ekonomi, politik, sosial budaya, psikologi, teknologi dan lainnya, yang saling berkaitan secara erat satu dengan lainnya (Suryawati, 2005:5). Salah satu penghambat dalam jalannya pembangunan dan kesejahteraan suatu bangsa, terlihat dari tingginya angka kemiskinan yang ada. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, untuk itu

pemerintah membangun program penanggulangan kemiskinan dengan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Salah satu program khusus yang di keluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 (Kementerian Sosial, 2019). Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat (PKH) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi mencatat jumlah penduduk pada tahun 2019 mencapai 328.680 jiwa, dari jumlah penduduk Kota Sukabumi tersebut dapat dilihat jumlah penduduk miskin berjumlah 21.870 jiwa atau 6.67 persen penduduk yang masuk kedalam golongan miskin (BPS, 2019). Melalui Program Keluarga Harapan yang sudah dialokasikan ke daerah-daerah termasuk Kota Sukabumi, pada tahun 2019 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan di Kota Sukabumi sebanyak 9.014 kepala keluarga (Dinas Sosial Sukabumi, 2019). Dibuktikan dengan adanya sebaran jumlah anggota penerima bantuan program keluarga harapan di Kota Sukabumi, yaitu kecamatan Baros 1.069 KPM, kecamatan Cibereum 1.311 KPM, kecamatan Cikole 1.544 KPM, kecamatan Citamiang 1241 KPM, kecamatan Gunungpuyuh 827 KPM, kecamatan Lembursitu 1.990 KPM dan kecamatan Warudoyong 1.832 KPM. Terlihat dari jumlah masyarakat yang mendapatkan dana bantuan Program

Keluarga Harapan yang paling tinggi berada pada Kecamatan Warudoyong. Ini terjadi karena mayoritas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan masih rendah, sehingga masalah tersebut menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Warudoyong.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong ini sudah dijalankan sejak tahun 2017, namun dampak dari program tersebut belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan nampak belum efektif dikarenakan ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti, (1) Penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan awal. Adanya penerima bantuan yang menggunakan dana tersebut untuk pembayaran cicilan kendaraan, elektronik dan pinjaman bank keliling pada beberapa keluarga penerima manfaat (2) Sasaran dalam penerimaan bantuan PKH tidak tepat. Dimana adanya data yang tidak sinkron yang diberikan dari pusat dan pada tahap validasi data, (3) Mengenai sosialisasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yang dilakukan terlihat kurang optimal. Dilihat dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang seharusnya satu bulan sekali diadakan tetapi faktanya P2K2 dilakukan dua bulan sekali atau tidak menentu, dan (4) Peran tenaga pendamping dalam memonitoring jalannya program keluarga harapan ini belum maksimal. Di Kecamatan Warudoyong tenaga pendamping 1:458 keluarga penerima manfaat padahal tenaga pendamping yang ideal seharusnya 1:300 keluarga penerima manfaat.

Dari hambatan-hambatan tersebut, program keluarga harapan yang seharusnya

dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga sejauh ini belum terlihat. Masih banyak faktor baik dari implementor dan penerima manfaat yang menjadi faktor penghambat utama dalam jalannya program. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan, seberapa besar pengaruh dari implementasi kebijakan program keluarga harapan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan ?

Berdasarkan uraian dari pendahuluan yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan melalui penelitian “Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi”.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut *Webster's Dictionary* dalam (Tachjan, 2006:23) bahwa: “Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*)”. Kemudian Tachjan (2006:23) mengemukakan “Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, kebijakan publik dibuat hanya akan menjadi ‘macan kertas’ apabila tidak berhasil dilaksanakan”. Jadi dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui dengan penggunaan sarana untuk

mencapai tujuan akhir yang diharapkan atau hasil kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Adapun karakteristik pengukuran implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Agustino, 2017 : 137-140) melalui dimensi-dimensi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi sebagai berikut :

a. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi merupakan tahap penyampaian informasi secara akurat, dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

b. Sumber Daya (*resource*)

Sumber daya mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia, merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya manusia (staff) harus mencukupi jumlahnya dan harus mempunyai keahlian yang cakup. Sehingga antara jumlah staff yang dan keahlian yang dimiliki harus sesuai dengan tugas pekerjaannya.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan

kebijakan dapat diwujudkan. Sikap yang bisa mempengaruhi berupa sikap menerima, tidak perhatian, atau menolak. Jika pelaksana suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

d. **Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur Birokrasi salah satu yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika unsur birokrasi tidak kondusif maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif.

2. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pasal 19:

“Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang

dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan”.

Adapun tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan maupun pendidikan dan diharapkan dapat memutuskan rantai kemiskinan sehingga program PKH ini dapat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millennium atau *Millenium Development Goals* (MDGs). Secara khusus dalam (Kementrian Sosial, 2019) tujuan Program Keluarga Harapan yaitu, (1) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, (2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, (3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan (5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

3. Efektivitas

Menurut (Makmur, 2011:6) menyatakan efektivitas adalah “Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakan ketepatan antara harapan yang diinginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat dikatakan sebagai ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai”. Sedangkan menurut (Budiani, 2007) dalam

Jurnal Ekonomi Sosial menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut: (1) Ketepatan sasaran program, (2) Sosialisasi program, (3) Tujuan program, dan (4) Pemantauan program. Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat diartikan juga sebagai suatu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria sebagai berikut :

- (1) Ketepatan penentuan waktu,
- (2) Ketepatan perhitungan biaya,
- (3) Ketepatan dalam pengukuran,
- (4) Ketepatan dalam menentukan pilihan,
- (5) Ketepatan berfikir,
- (6) Ketepatan dalam melakukan perintah,
- (7) Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan
- (8) Ketepatan sasaran.

Adapun dimensi – dimensi sebagai pengukuran efektivitas program atau kebijakan menurut Duncan yang dikutip (Steers, 1980:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan dimensi efektivitas sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian ialah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan

pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bgaian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu, kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesud dan komunikasi dnegan berbagai macam organisasi lainnya. Integrase menyangkut proses sosialisasi

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja maupun kemampuan dan sarana prasarana.

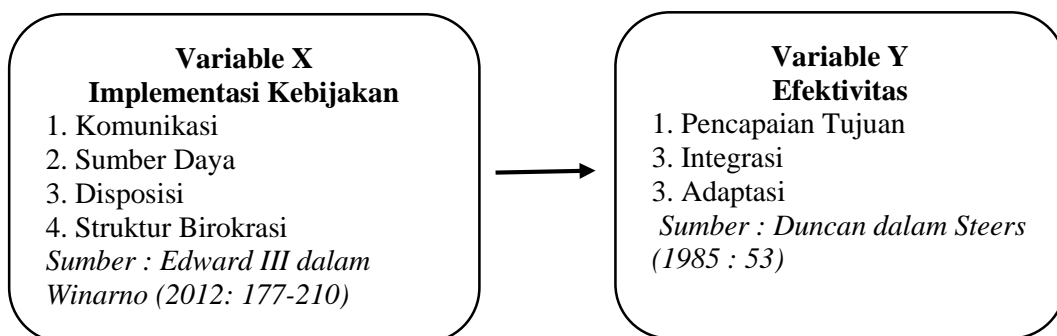
Dalam penelitian ini, berdasarkan teori – teori yang dikemukakan diatas oleh para ahli mengenai implementasi kebijakan dan efektivitas. Maka dari kedua variabel ini memiliki keterkaitan antara implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas (Y), karena dengan adanya implementasi kebijakan yang baik maka akan menghasilkan efektivitas pada tujuan yang diharapkan.

Pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas dijelaskan menurut Islamy (2010:107) mengemukakan bahwa “suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat”. Berdasarkan uraian diatas, pengaruh implementasi kebijakan terhadap

efektivitas mempunyai hubungan dalam pencapaian hasil.

Maka dapat dirumuskan pola pemikiran penelitian ini, bahwa

implementasi kebijakan sebagai variabel bebas dan efektivitas sebagai variabel terikat. Dengan bentuk kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang, landasan teori dan kerangka berfikir. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah “Terdapat pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi”. Dengan hipotesis statistiknya sebagai berikut :

Ho : $\beta = \Theta$, Hipotesis Nol artinya, tidak ada pengaruh antara Implementasi Kebijakan Pogram Keluarga Harapan terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
Ha : $\beta \neq \Theta$ Hipotesis Alternatif artinya, terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluraga Harapan terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif jenis penelitian kausal menurut (Silalahi, 2015:221) hubungan kausal ialah “Jika perubahan dalam nilai dari satu variabel secara

sistematis membawa dampak perubahan dalam nilai variabel lain”. Atau yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih dan bersifat sebab-akibat. Adapun populasi dari penelitian ini adalah keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong. Dengan jumlah anggota populasi sebanyak 1.832 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Sedangkan teknik sampling dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*), agar proses penetapan anggota sampel ini benar adanya maka penelitian ini akan menggunakan rumus pengambilan sampel yang dikemukakan oleh *Slovin* dengan batas kesalahan erorr 10% persen sehingga sampel yang di dapat dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara: (1) Obeservasi, pengamatan secara sengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial yang akan diteliti, (2) Kuisisioner, memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk mendapatkan data

mengenai Program Keluarga Harapan dan tentang efektivitasnya, (3) Wawancara, untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak di dapatkan dari kuisisioner, dan (4) Studi Kepustakaan, mempelajari, mengkaji dan menelaah *literature* berupa buku, jurnal maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui uji (1) Analisis koefisien korelasi, untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel, (2) Koefisien determinasi, untuk melihat besar kecilnya kontribusi variabel implementasi kebijakan (X) terhadap efektivitas (Y), (3) Analisis regresi linier sederhana, memprediksikan nilai tingkat pengaruh antara variabel implementasi kebijakan (X) dengan variabel efektivitas (Y), dan (4) Uji t-parsial, untuk melihat diterima atau ditolaknya hipotesis dalam penelitian. Teknik analisis data ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Statistic Package for Social Science* (SPSS) versi 21.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan variabel implementasi kebijakan (X) dengan jumlah dimensi sebanyak 4 maka indikator akan dijabarkan kedalam kuisisioner dengan bentuk

pernyataan sejumlah 12 pernyataan sedangkan variabel efektivitas (Y) mempunyai dimensi sebanyak 3 maka indikator yang akan menjadi pernyataan dalam kuisisioner sebanyak 9 pernyataan. Ini berarti jumlah pernyataan dalam kuisisioner sebanyak 21 butir, yang didistribusikan kepada 100 responden keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Setiap alternatif pilihan (opsi) jawaban responden, diberi nilai skor 5 (Sangat Setuju), 4 (Setuju), 3 (Ragu-Ragu), 2 (Tidak Setuju), dan 5 (Sangat Tidak Setuju).

Adapun pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir Sugiyono (2014:151). Pengujian validitas instrument ini dengan menggunakan rumus korelasi *product moment*. Dan Pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*.

1) Analisis Data Penelitian

a. Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden, diperoleh gambaran tentang skor variabel implementasi kebijakan (X) Program Keluarga Harapan sebagai berikut :

Tabel 1. Skor Variabel Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong

No	Dimensi	No Item	Indikator	Skor
1.	Komunikasi	1	Penyampaian pesan secara menyeluruh	414
		2	Komunikasi atau bahasa yang digunakan	436
		3	Penyebaran informasi	422
2.	Sumber Daya	4	Kompetensi sumber daya manusia	415
		5	Dukungan sarana dan prasarana	432

	6	Dana PKH sudah sesuai dengan yang ditetapkan	433
	7	Motivasi pemenuhan hak dan kewajiban	436
3. Disposisi	8	Respon pendamping	424
	9	Solusi terhadap permasalahan yang timbul	423
	10	Pedoman pelaksanaan program	445
4. Struktur Birokrasi	11	Jalannya koordinasi dan kerjasama	433
	12	Pendamping bertanggung jawab	449

Sumber: data hasil Penelitian kuisisioner di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, 2020

Berdasarkan tabel diatas peneliti menganalisis bahwa dimensi dan indikator yang menunjukkan skor tertinggi diperoleh pada dimensi struktur birokrasi melalui indikator pendamping bertanggung jawab sebesar 449 total skor. Ini berarti bawasannya pendamping sudah melakukan tugasnya sesuai *desk job* seperti bertanggung jawab pada merespon keluhan-keluhan, maupun penyaluran dana bantuan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Agustino, 2017) bahwa tanggung jawab merupakan aktivitas penting, tanpa adanya tanggung jawab dari implementor maka program tidak akan bisa berjalan. Tanggung jawab menjadi dasar dari sikap maupun kompetensi yang harus dimiliki pendamping sehingga dapat menghasilkan implementasi yang lebih efektif jika dilaksanakan dengan kompeten.

Sedangkan skor terendah yang diperoleh dalam variabel implementasi yaitu, dimensi komunikasi dengan melalui indikator penyampaian pesan dengan skor 414, bahwa para pendamping dalam Program Keluarga Harapan sudah memberikan informasi kepada masyarakat melalui media elektronik dan non elektronik ataupun pertemuan. Namun dalam hal ini masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terjadi seperti, masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas media elektronik yang mumpuni,

masyarakat kesulitan dalam memahami informasi melalui pamflet dan didukung dari pertemuan yang tidak sesuai dengan jadwal menyebabkan banyak dari keluarga penerima manfaat yang tidak hadir sehingga menimbulkan ketidak merataan pesan ataupun informasi yang diperoleh oleh setiap keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil analisis menyimpulkan bahwa penyampaian informasi belum cukup baik, dan hal ini berkesinambungan dengan apa yang dikatakan oleh Edward III, bahwa penyebaran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Ini artinya bahwa adanya penyampaian pesan ataupun informasi kepada sasaran kebijakan Program Keluarga Harapan oleh pendamping diharapkan dapat berjalan secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat membantu memberikan informasi kepada keluarga penerima manfaat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan pedoman program dan diharapkan dapat mengurangi miskomunikasi yang terjadi.

Implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan tidak luput dari adanya faktor pendorong dan penghambat. Salah satu faktor pendorong dalam implementasi program ini yaitu terlihat dari adanya dukungan aktor-aktor yang terlibat, dukungan yang hadir bukan hanya saja dari implementor namun sasaran ataupun target

dari program ini ikut andil dalam jalannya koordinasi dan kerjasama dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan ini. Aktor tersebut meliputi, para pendamping yang senantiasa selalu bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, pengawasan kepada keluarga penerima manfaat (KPM), baik pihak Dinas Sosial maupun pihak Kecamatan Warudoyong yang selalu ikut serta dalam mengawasi dan mengontrol jalannya Program Keluarga Harapan dan dukungan dari keluarga penerima manfaat yang sudah kooperatif dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan ini. Selain koordinasi, kerjasama dan tanggungjawab sebagai faktor pendukung, fasilitas juga turut hadir dalam menudukung tujuan dari Program Keluarga Harapan ini. Dalam proses sosialisasi ataupun pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) fasilitas yang memadai seperti tepat pertemuan yang sudah disediakan, pemateri dari berbagai macam ahli baik kesehatan maupun pendidikan yang dihadirkan, dan modul pembelajaran yang selalu dibagikan untuk memudahkan pemahaman KPM.

Peneliti disini tidak hanya menganalisis faktor pendorong saja, namun ada juga temuan dari faktor-faktor penghambat jalannya implementasi kebijakan pada Program Keluarga Harapan ini diantaranya, kompetensi yang ada pada para pendamping dilihat belum memenuhi dalam kriteria pendampingan. Terlihat dari komunikasi yang dilakukan oleh

pendamping masih ada tata bahasa yang tidak cocok seperti istilah-istilah yang tidak umum sehingga banyak dari KPM yang tidak memahami, dan juga pendamping masih terlihat belum menguasai program sehingga terkadang ada misinformasi atau miskomunikasi yang terjadi antar pendamping dan KPM. Hal ini yang menjadikan jalannya program akan terhambat, mengapa demikian karena pendamping merupakan garda utama dalam pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan. Pendamping yang utama dalam memberikan pemahaman tentang program, melaksanakan pemuktahiran data, serta memastikan KPM menerima bantuan. Sehingga dalam hal ini, peneliti memberikan solusi untuk membenahi faktor penghambat implementasi kebijakan program. Dengan diadakannya pelatihan ataupun bimbingan mengenai peningkatkan kompetensi, pemahaman dan pengetahuan program, maupun sikap dan nilai yang diadakan oleh instansi terkait setiap triwulan sekali. Hal ini sekaligus sebagai tahap evaluasi kinerja pendamping, sehingga kompetensi pendamping dapat meningkat seiring dengan pelatihan ataupun bimbingan tersebut.

b. Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden, diperoleh gambaran tentang skor variabel efektivitas (Y) penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 2. Skor Variabel Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong

No	Dimensi	No Item	Indikator	Skor
1.	Pencapaian Tujuan	1	Sasaran Program Keluarga Harapan	399
		2	Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	416

	3	Pencairan dana bantuan	454
	4	Sosialisai sesuai jadwal	436
2.	5	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	443
	6	Verifikasi data mudah	414
3.	7	Kuantitas Pendamping	424
	8	E-Warong	461
	9	Interkasi Pendamping dan KPM	453

Sumber: data hasil Penelitian kuisisioner di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, 2020

Berdasarkan tabel diatas peneliti menganalisis bahwa dimensi dan indikator yang menunjukkan skor tertinggi diperoleh pada dimensi adaptasi melalui indikator fasilitas E-warong sebesar 416. Ini berarti fasilitas dari Program Keluarga Harapan ini sudah berjalan dengan maksimal, terlihat dari harga-harga bahan pokok yang murah dan teknik pembayaran yang cepat dan dengan adanya E-warong serta kartu combo dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dan kemudahan kontrol serta tepat sasaran waktu maupun jumlah. Sedangkan skor terendah yang diperoleh dari variabel efektivitas yaitu dimensi pencapaian tujuan dengan melalui indikator sasaran Program Keluarga Harapan sebesar 399 total skor, bahwa data penerima Program Keluarga Harapan memang di dapatkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah pada data terpadu (BDT) Kementrial Sosial sehingga akan di tetapkan sasaran dari keluarga penerima manfaat. Sehingga sering kali terjadi kesalahan penerima manfaat yang kurang tepat sasaran.

Adapun simpulan analisis menyatakan bahwa sasaran dari program keluarga harapan memang seringkali terjadi kesalahan hal ini disebabkan dari data yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga menimbulkan ketidakepatan sasaran. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Makmur (2011: 8)

yang menyatakan bahwa penentuan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, merupakan penentuan keberhasilan aktivitas dari kebijakan. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan dalam kebijakan itu sendiri. Sehingga, dalam ketepatan sasaran yang tepat akan menghasilkan pencapaian tujuan suatu program yang maksimal. Untuk itu diperlukan lagi pemukhtahiran data kelapangan guna menghindari salah sasaran.

Adapun hasil analisis faktor – faktor pendorong dan penghambat variabel (Y) terlihat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam mencapai efektivitas penanggulangan kemiskinan. Peneliti menemukan faktor pendorong dari efektivitas penanggulangan kemiskinan dari program ini yaitu adanya Pertemuan dan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) memberikan manfaat yang baik kepada KPM. Disini KPM diberikan banyak pengetahuan, sikap dan perilaku untuk perbaikan kualitas pengasuhan anak, pengelolaan keuangan dan lainnya. Selanjutnya ada faktor dukungan dari sumber daya fasilitas maupun finansial yang diberikan oleh pemerintah. Dana yang mencukupi untuk diberikan setiap tahunnya kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan fasilitas-fasilitas yang

mumpuni seperti adanya E-warong, dengan adanya E-warong ini dapat mendorong KPM untuk dapat memenuhi kebutuhan gizi anak dengan baik tanpa perlu khawatir. Oleh karena itu melalui faktor pendukung ini, pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya tercapai tujuan peningkatan kualitas hidup RTSM. Selain itu hasil analisis penelitian pun menghasilkan temuan faktor penghambat pencapaian tujuan utama efektivitas program ini. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Warudoyong ini ialah masih banyak dari RTSM yang belum benar-benar tidak memahami hak dan kewajiban dari program ini, sehingga masih ada penyimpangan-penyimpangan dana bantuan yang diterima. Selanjutnya dari pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dilakukan tidak konsisten atau tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dan dilihat dari jumlah kuantitas pendamping pun masih kurang dan tidak sesuai dengan aturan dalam pedoman program sehingga terjadi

ketidak optimalan dalam pemberian bimbingan kepada keluarga penerima manfaat. Untuk itu peneliti mencoba untuk memberikan solusi yang pertama, sosialisasi harus lebih ditingkatkan kembali tidak hanya melalui pertemuan-pertemuan namun penyebaran pamflet-pamflet yang berisikan informasi program yang dapat cepat dipahami oleh RTSM, lalu dari kesalahan sasaran harus segera ditindak dan segera diadakan penambahan jumlah pendamping sehingga efektivitas dari program ini dapat tercapai.

2) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dalam pengujiannya dilakukan kepada 100 responden dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Berikut analisis uji hipotesis :

- a. Analisis koefisien korelasi dilakukan berdasarkan rumus korelasi *pearson product moment* dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan perhitungan statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS 21, sehingga hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Korelasi Variabel Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas

Model Summary ^b			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
,724 ^a	,524	,360	2,877

Sumber : Data hasil Penelitian, Perhitungan Statistik, 2020

Berdasarkan pada tabel interpretasi diatas, analisis koefisien korelasi dalam penelitian ini mendapatkan angka hubungan sebesar 0,724 yang merupakan kategori tingkat hubungan yang kuat (0,60 – 0,79) (Sugiyono, 2014 : 214). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, hubungan yang

dimiliki variabel implementasi kebijakan program keluarga harapan dengan efektivitas penanggulangan kemiskinan merupakan hubungan yang kuat. Dan diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,524 atau dalam presentase diperoleh nilai koefisien determinasi

sebesar 52,4 %. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sumbangan implementasi kebijakan program keluarga harapan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan sebesar 52,4 % sedangkan sisanya 47,6 % merupakan pengaruh dari variabel-variabel yang tidak dihitung.

b. Hasil pengujian analisis regresi linier sederhana menghasilkan model persamaan regresi sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,913	3,675		,248	,804
1 Implementasi	,738	,071	,724	10,388	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber : Data hasil Penelitian, Perhitungan Statistik, 2020

Diperoleh model persamaan regresi $Y = 0,913 + 0,738 X$. Persamaan regresi linier ini dapat diinterpretasikan bahwa, analisis regresi variabel implementasi kebijakan memiliki tanda positif (0,738) yang berarti bahwa implementasi kebijakan searah dengan variabel efektivitas. Atau

setiap peningkatan implementasi kebijakan program keluarga harapan maka akan terjadi peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan.

c. Hasil pengujian signifikansi terhadap hipotesis sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Koefisien untuk Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,913	3,675		,248	,804
1 Implementasi	,738	,071	,724	10,388	,000

a. Dependent Variable: Efektivitas

Hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ho : $\beta = 0$, Hipotesis Nol, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.

Ha : $\beta \neq 0$, Hipotesis Alternatif, artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar 10,388. Hal ini berarti nilai t_{hitung} sebesar 10,388 pada

probabilitas 0,01 maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,660. Dari hasil perhitungan ini berarti t_{hitung} 10,388 > t_{tabel} 1,660 dengan demikian dapat dibuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti implementasi kebijakan program keluarga harapan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. Artinya semakin baik pelaksanaan implementasi akan semakin baik efektivitas dan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Islamy (2010:107) bahwa "Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat".

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Warudotong Kota Sukabumi. Dan mempunyai hubungan yang kuat, terlihat dari dimensi struktur birokrasi pada indikator pertanggung jawaban, koordinasi dan kerjasama dan pada dimensi adaptasi yang menunjukkan rata-rata responden menyatakan setuju terhadap pernyataan tersebut.

Namun, masih ditemukan aspek yang kurang efektif, hal itu sejalan dengan kendala yang dihadapi dimana kompetensi dari para pendamping masih relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan kembali melalui pelatihan-pelatihan secara berkala.

2. Hasil perhitungan yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi mempunyai sumbangan yang relatif baik. Artinya, semakin baik implementasi kebijakan program keluarga harapan dilaksanakan maka efektivitas penanggulangan kemiskinan pun semakin baik. Dan tidak luput dalam penelitian ini juga masih ditemukan kendala dari pencapaian tujuan, komunikasi, dan sosialisasi yang masih harus ditingkatkan.

Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan pembahasan, maka peneliti selanjutnya akan merumuskan beberapa saran sebagai pertimbangan dan masukan terhadap Program Keluarga Harapan. Adapaun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan , dalam program keluarga harapan ini diharapkan implementor lebih memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban penerima manfaat. Untuk bisa lebih, aktif dalam setiap pertemuan P2K2, pengelolaan keuangan dengan baik dan tepat sesuai dengan komponen kebutuhan penerima.
2. Integritas, untuk pengadaan sosialisasi diharapkan untuk dapat

tersampaikan dengan baik. Karena masih banyak dari penerima manfaat yang tidak selalu bisa hadir dalam sosialisasi, dan diharapkan lebih memperhatikan sosialisasi dalam penggunaan *phamflet* dengan *detail* agar informasi dapat diserap dengan mudah oleh keluarga penerima manfaat.

3. Adaptasi, dalam pemenuhan kuantitas pendamping lebih diutamakan. Karena pendamping menjadi garda terdepan untuk mensukseskan program kerluaga harapan ini. Dengan kuantitas pendamping yang cukup akan memudahkan tercapainya tujuan program secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, L. (2017 : 137 - 140). *Dasar-dasar kebijakan publik edisi revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Islamy. (2010 : 107). *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Makmur. (2011 : 6 - 8). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Silalahi, U. (2015 : 221). *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Steers, R. (1980 : 35). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014 : 151). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati. (2005 : 5). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensi*. 08(03).
- Tachjan. (2006:23). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Dokumen :

- BPS. (2019). *Jumlah Penduduk Miskin 2019*. Sukabumi: BPS Kota Sukabumi.
- Dinas Sosial Sukabumi. (2019). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKH Kota Sukabumi*. Sukabumi: Dinas Sosial.
- Kementrian Sosial. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (2019th ed.)

Jurnal :

- Budiani. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi Dan Sosial*, 2(1), 49–57. di akses pada 25 12,2019 dari <https://media.neliti.com/media/publications/43816-ID-efektivitas-program-penanggulangan-pengangguran-karang-taruna-eka-taruna-bhakti.pdf>

Artikel :

- Kompasiana.com. 2012. Kemiskinan Induk Permasalahan Sosial. di akses pada 18 01,2020 dari [hhttps://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/novendra/sosial_550d7965a333116e1c2e3c05](https://www.google.co.id/amp/s/www.kompasiana.com/amp/novendra/sosial_550d7965a333116e1c2e3c05)

Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.